



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 17 Februari 2020

Halaman: 2

BPJS KESEHATAN TAMBAHI BEBAN APBD

Yogya Usulkan Kembali ke Jamkesda

UMBULHARJO (MERAPI) - Pembiayaan jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah diusulkan dikembalikan melalui program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Pasalnya pembiayaan melalui BPJS Kesehatan menambah beban APBD dan pelayanannya dinilai tidak maksimal.

"Kami lewat Apeksi kota dan asosiasi pemerintah kabupaten sudah melakukan diskusi internal dan ada yang sudah buat rekomendasi ke pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali jaminan kesehatan daerah," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Minggu (16/2).

Menurutnya Jamkesda lebih mudah dimanfaatkan dibandingkan dengan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah bertanggungjawab penuh kepada pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Selain itu pembiayaan Jamkesda tidak membebani APBD dibandingkan dengan BPJS Kesehatan yang kini iurnya meningkat.

"BPJS Kesehatan itu membayari orang yang sehat seperti asuransi. Sedangkan Jamkesda membayari orang yang sakit," ujarnya.

Dia menyatakan, muncul banyak keluhan terkait pelayanan kesehatan melalui BPJS kesehatan yang tidak maksimal baik dari rumah sakit maupun dokter dan pasien. Biaya iur BPJS kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah semakin membebani APBD. Dicontohkan di Kota Yogyakarta alokasi anggaran untuk kebutuhan BPJS Kesehatan dalam APBD Kota Yogyakarta 2020 mencapai sekitar Rp 52 miliar. Sedangkan anggaran untuk jamkesda dialokasikan sekitar Rp 27 miliar.

"Di Yogya kenaikan hampir 100 persen untuk pembiayaan BPJS Kesehatan dengan kenaikan iur di tahun 2020. Ini kan semakin lama akan memberikan beban bagi pemerintah daerah," tegas Heroe.

Dengan kondisi tersebut pihaknya berharap masukan melalui Apeksi maupun asosiasi pemerintah kabupaten, bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat, agar daerah bisa menerapkan jamkesda. Diakukannya dengan kembali Jamkesda itu bertentangan dengan Undang Undang terkait jaminan kesehatan yang harus terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

"Secara aturan memang ada Undang Undangnya. Kami sudah berbicara dengan anggota dewan DPR untuk mencoba mengkaji memberikan alternatif lain dan jalan terbaik. Alternatif lain yang tidak merepotkan dari sisi pelayanan medis dan anggaran APBD," terangnya.

Dia menilai, pelaksanaan BPJS Kesehatan pada tahun 2020 menjadi sangat penting untuk melihat kemampuan masyarakat mengikuti BPJS Kesehatan. Jika masyarakat tidak mampu, maka akan turun kelas dan menjadi tanggungan pemerintah.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiarmoko mengatakan dewan banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait layanan BPJS kesehatan yang tidak bisa menanggung semua penyakit. Terutama penyakit-penyakit berat seperti kanker. Hal itu menjadi beban bagi masyarakat miskin.

"Kenaikan iur BPJS Kesehatan tahun ini juga membuat kami sedikit mengurangi skala prioritas dalam APBD," tandas Danang.

(Tri)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005